

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Opini WTP jadi Bukti Keberhasilan Heru Pimpin Jakarta

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi Hartono kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Opini WTP ini bahkan sudah ketujuh kalinya diterima Pemprov DKI Jakarta selama berturut-turut setiap tahun.

Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia, Ari Subagio Wibowo mengatakan, predikat WTP yang selalu berhasil diraih selama Heru Budi Hartono menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menjadi salah satu bukti keberhasilannya.

Pemberian predikat WTP dari BPK ini menjadi indikator bahwa Heru mampu mengimplementasikan good governance and clean government.

"Dia mampu mempertanggungjawabkan penggunaan APBD. Pak Heru berhasil memimpin Jakarta," kata Ari pada Selasa (30/7/2024).

Ari menjelaskan, selama memimpin Jakarta, Heru sangat menonjol ingin

melaksanakan aturan-aturan dan melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan.

Dia mencontohkan Heru melakukan penataan dan penertiban NIK yang berkorelasi dengan penerimaan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, m.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan juga melakukan penataan guru yang direkrut tidak sesuai aturan berlaku sebagaimana temuan BPK.

Menariknya, dari permasalahan ini diberikan solusi agar aturan bisa ditegakkan dan guru yang bersangkutan masih diberikan kesempatan untuk mengajar.

"Mereka juga diperjuangkan peningkatan kesejahterannya melalui status Kontrak Kerja Individu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maupun Calon Pegawai Negeri Sipil," tuturnya.

Ari berharap, ke depan Pemprov DKI Jakarta dapat semakin mewujudkan transparansi penggunaan anggaran dan menerapkan keterbukaan informasi publik. **(faf)**



Istimewa